

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : cv. Alfabeta.
- Creswell, J.W. 1994. *Research design qualitative and quantitative approaches.sage publications. London*.
- Edward III, George C. 1980. *Implementating Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia. Jakarta, 1984.
- Jack C. Plano.1994. *Peran Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution.S. 1996. *Metode Penelitian. Kualitatif, Remaja Rosda Karya*, Bandung.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN BalaiPustaka.
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: Bandar Maju.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit AIPI Bandung, Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo.

Jurnal:

- Alawiyah, R. (2016). Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, 4(4).

- Buleleng, D. I. K. (2015). Analisis Dampak Program Pengembangan. 4(1), 523–533.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Imam Indratno, (2005). Studi Kemampuan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. 11(3), 416-429
- Lubis, S. Z. (2017). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Beras Miskin (Studi Kasus Kenagarian Tanjung Betung). *Jurnal Wahana inovasi*, 6(2), 2089-859.
- Meitasari, D., Setiyono, B. (2015). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Tradisional Desa Bendar, Kecamatan Sumatera Barat) *Journal of Politic and* 4(3), 1–21.
- Noorsetya, B., Dinata, C., & Chayatin, U. (2020). *Social Inclution* Dan penguatan Kelembagaan Sosial Dalam Otonomi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1).
- Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 9(1), 56–68.
- Putera, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 6(1).
- Rahman, N. A. (2014). Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(2), 147-160.
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut , Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 4(1), 311–330.
- Saliem, H. P., & Marisa, Y. (2006). Prospek Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan Sangkilen, L. D. R. (2021). Inovasi Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui “Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan”. *Jurnal Politico*, 10(4).
- Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kertu Penjamin Sosial Dan Kartu

Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 6(1), 101281.

Toda, H. (2016). Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).

Wulan, Y. C., Ati, N. U., & Widodo, R. P. (2019). Implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 104–109.

Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8(3), 176–185.

Skripsi/ Tesis

Azhara, R. (2016). Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tasikmalaya (*Doctoral dissertation*, UNPAS).

Djannata, A. A., & Atmanti, H. D. (2011). Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Semarang dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP) (*Doctoral dissertation*, Universitas Diponegoro).

Fernando, J. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang (*Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science*).

Intan Purnamasari: Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Suzuki Indomobil Motor Plant Tambun

Ningsih, M. P. (2012). Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Malang).

Produk Hukum:

Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan.

Web:

Asa satria. (2005). Implementasi Kebijakan Publik. Gadjah Mada. <https://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html> (Diakses, April 2020)

Asa satria. (2005). Implementasi Kebijakan Publik. Gadjah Mada. <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik.html> (Diakses Agustus 2020)

Asa satria. (2005). Implementasi Kebijakan Publik. Gadjah Mada. <https://www.materibelajar.id/2016/04/teori-kemiskinan-pengertian-definisi.html> (Diakses Juli 2020)

Budi Winarno. (2020). Pengertian Kebijakan Publik. Dosen Pendidikan 2. <http://jdih.rembangkab.go.id/perda-no-5-2019-penanggulangan-kemiskinan/> (Diakses November 2020)

Budi Winarno. (2020). Pengertian Kebijakan Publik. Dosen Pendidikan 2. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kebijakan-publik/> (Diakses Mei 2020).

Muhammad Iqbal (2009). Penanggulangan Kemiskinan [https://www.academia.edu/8442852/Iqbal et al 2009 A Review Of The Status Of The White Headed Stilt Himantopus Leucocephalus In Sumatra Indonesia](https://www.academia.edu/8442852/Iqbal_et_al_2009_A_Review_Of_The_Status_Of_The_White_Headed_Stilt_Himantopus_Leucocephalus_In_Sumatra_Indonesia) *Stilt* 59: 2 -5 (Diakses Juli 2020).

M. Iqbal Tuasikal (2009). Konsep Program Pengembangan Kecamatan. Kulon Progo D.I.Y <https://miqbaltuasikal.wordpress.com/2009/10/28/konsep-pemahaman-ppk/> (Diakses Juni 2020).

- M. Prawiro. (2018). Pengertian Kemiskinan. *Reserved*
<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html> (Diakses 11 Agustus 2020)
- Syamsul Bahri (2017). Strategi Penanggulangan Kemiskinan. *Braindilog*
<http://www.braindilogsociology.or.id/2017/12/strategi-penanggulangan-kemiskinan-di.html> (Diakses September 2020)
- Yostan Absalom Labola. (2017). Strategi Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Databooks.co.id*
<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kebijakan-publik/> (Diakses September 2020)

DAFTAR PERTANYAAN

A. Kebijakan yang diidealkan

1. Bagaimana menurut bapak /Ibu/sdr/i Apakah ada komunikasi antara sesama aparatur pegawai Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dan Pendamping Program PKH dengan masyarakat dalam implementasi program PKH ?.
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, apakah ada sosialisasi yang disampaikan oleh pegawai Kecamatan Sukawangi dan Pendamping Program PKH kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program PKH ?

B. Organisasi Pelaksana :

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada pertanggung jawaban dari aparatur Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dan Pendamping Program PKH dalam implementasi kebijakan PKH pada rumah tangga sangat miskin ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada konsistensi terhadap aturan dalam kebijakan oleh aparatur Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dan Pendamping Program dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan pada rumah tangga sangat miskin ?

C. Kelompok Sasaran :

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada dukungan dari masyarakat terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada pemahaman dari masyarakat mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan ?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada kesesuaian antara masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dengan kondisi perekonomiannya ?

D. Faktor Lingkungan :

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada factor ekonomi yang

mendukung keberhasilan kebijakan implementasi PKH pada rumah tangga sangat miskin ?

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada mobilisasi kelompok yang menolak dan mendukung implementasi kebijakan PKH pada rumah tangga sangat miskin ?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Kebijakan yang diidealkan

Pertanyaan : Bagaimana menurut bapak /Ibu/sdr/i Apakah ada komunikasi antara sesama aparatur pegawai Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dan Pendamping Program PKH dengan masyarakat dalam implementasi program PKH ?.

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar ; awalnya sudah jelas kami adakan dulu kordinasi dengan aparat terkait. Rapat kordinasi dihadiri unsur dinas kabupaten, pegawai kecamatan pelaksana PKH, dan pendamping lapangan. Hasil rapat kemudian akan diturunkan menjadi rencana kerja proses sosialisasi, pendataan dan waktu pembagian dana PKH untuk peserta”.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar : awalnya kami ikut dalam rapat dengan bapak camat. Setelah rapat baru kami bahas dengan aparat desa untuk menindaklanjuti program kerja menjadi langkah-langkah yang kami lakukan untuk mendukung program. Salah satu rencana kerja yang menjadi amanat dalam rapat adalah kami mendampingi petugas PKH yang akan melakukan pendataan dan sosialisasi dilapangan.
3. Ketua PKH Desa Sukamekar: pelaksanaan PKH selama 1 tahun. Dalam 1 tahun kami adakan rakor tiap bulan untuk mencari tahu perkembangan lapangan. Juga untuk membahas kendala teknis yang dialami teman-teman pelaksana dilapangan”.
4. Bapak Kaur Kesra Desa Sukamekar : komunikasi sudah seperti mekanisme kerja program biasanya. Arahkan dari pak camat kami dari kasie berkordinasi dengan pendamping untuk menindaklanjuti teknis kerja ketingkat desa dan masyarakat. komunikasi kami lakukan dengan kewilayahan dalam hal ini para kades, untuk menyusun program kerja bersama melakukan kegiatan sosialisasi dimasyarakat.”. .

Pertanyaan : apakah ada kendala dalam menjalankan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan PKH?.

Jawaban :

1. Bapak Kepala Desa Desa Sukamekar: kendala secara prinsip dalam komunikasi yang berakibat pada program saya belum menemukan, hanya mungkin kalo teknis sedikit- sedikit ada saja karna yang program kerja kecamatan dalam bidang bantuan masyarakat banyak tidak hanya PKH saja ya.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar, kendala tidak ada. Karena semua aparat memiliki peran dan tanggungjawabnya masing- masing.
3. Ketua PKH Desa Sukamekar; kendala dalam komunikasi secara pasti ada ya, Cuma kendala tersebut sifatnya teknis saja seperti mensinergiskan kegiatan lapangan saja. Tetapi yang berkaitan dengan program, karena ini berasal dari pusat dan pemda, jadi komunikasi sudah ada hirarkinya bagi kami pelaksana..

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, apakah ada sosialisasi yang disampaikan oleh pegawai Desa Sukamekar dan Pendamping Program PKH kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program PKH ?

Jawaban :

1. Kepala Desa Desa Sukamekar m ; program kerja tentunya merujuk pada panduan dari UPPKH kabupaten, yang meliputi kegiatan rakor dengan UPPKH kabupaten, penyusunan kerjan ditataran wilayah kecamatan, jadwal rakor dengan kabupaten, dan monitoring serta evaluasi programPKH. Aspek pentingnya ya sosialisasi, pendataan, monitoring dan evaluasi hasil.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar ; seperti tadi saya sampaikan, program kerja merupakan arahan dari pak camat sebagai turunan dari hasil rapat kerja dengan uppkh tingkat kabupaten. Kegiatan sosialisasi, rakor tim lapangan, pendampingan pendataan hingga pengawasan pada saat pencairan bantuan, itu beberapa program kerja penting yang yang dilakukan.

3. Ketua PKH Desa Sukamekar; program kerja sudah pasti ada ya, karena inikan harus dilaksanakan secara teknis. Program kerja dimana kami dari desa terlibat adalah pada saat mendukung kegiatan sosialisasi dan pendataan masyarakat penerima bantuan

Pertanyaan : untuk program sosialisasi seperti apa bentuknya, apakah ada jadwal yang kontinyu atau tidak?”.

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar; secara teknis sosialisasi kita bikin tiga tahapan, pertama adalah penjelasan umum dari program PKH untuk internal aparat mulai dari pegawai kecamatan, tim pendamping dan aparat dari pemerintahan desa agar mengetahui kedudukan dari program PKH di Sukawangi.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar ; sosialisasi awal mengenai program keluarga harapan dilaksanakan di Balai Desa. Sosialisasi disampaikan oleh Pegawai Kecamatan dan Pendamping PKH dengan melibatkan aparat desa, Pegawai Puskesmas Kecamatan, Pegawai Kantor POS, dan masyarakat penerima atau peserta program keluarga harapan, dan masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali mulai dari dilaksanakannya program keluarga harapan di Desa Sukaraja.
3. Ketua PKH Desa Sukamekar; sosialisasi kami adakan dua kali dengan tim kerja dikecamatan yang melibatkan kepala desa dan aparaturnya, kemudian mitra PKH dalam hal ini dari dinas pendidikan dan kesehatan, juga dari masyarakat. sosialisasi seputar penjelasan PKH dan juga alur penerimaan bantuannya.

B. Organisasi Pelaksana :

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada pertanggung jawaban dari aparat Kecamatan sukawangi dan Pendamping Program PKH dalam implementasi kebijakan PKH pada rumah tangga sangat miskin ?

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar; saya kira tanggungjawab kecamatan ada pada dua poin penting. Pertama, adalah konsolidasi kegiatan sosialisasi program pada masyarakat. kedua adalah proses pendataan masyarakat bersama pendamping lapangan.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar ; untuk tanggungjawab pendamping adalah sesuai dengan arahan dari UPPKH, yaitu mendampingi seluruh proses mulai dari sosialisasi, verifikasi dan pendataan, pencairan bantuan dan mendampingi warga yang dikemudian hari tidak terdata sebagai penerima bantuan.
3. Ketua PKH Desa Sukamekar; untuk tanggungjawab kami di desa adalah membantu dalam hal kegiatan sosialisasi pada masyarakat dan menginformasikan pada masyarakat untuk mendaftarkan diri apabila tidak masuk dalam penerima bantuan.

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada konsistensi terhadap aturan dalam kebijakan oleh aparat Kecamatan Sukawangi dan Pendamping Program dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan pada rumah tangga sangat miskin ?

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar; sesuai dengan arahan dari kabupaten, untuk kecamatan Sukawangi setiap desa sudah dibagikan kuota jumlah untuk keluarga penerima bantuan dengan jumlah nominal sesuai kondisi keluarganya. Kemudian, syarat-syarat administratif untuk warga penerima juga sudah ada secara hukum, artinya konsistensi adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini kecamatan mengawal agar tidak terjadi kesalahan data dan mekanisme prosedur dilapangan terutama berkaitan dengan jumlah bantuan yang diberikan.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar : konsistensi dari pemerintah yaitu tidak menambah data ditengah jalan ataupun mengurangi kuota penerima bantuan. Karena sudah ada juklak dan juknisnya.

3. Ketua PKH Desa Sukamekar: instruksi kami dari desa adalah membantu proses pendataan warga yang menerima bantuan. Kemudian juga membantu pendamping kecamatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pengawalan pencairan bantuan. Contohnya di desa Sukamantri, sebagai desa dengan jumlah penerima terkecil hanya 16 keluarga, tugas kami adalah bagaimana menjamin warga tersebut memperoleh haknya yaitu terdata dan menerima bantuan.
4. Ketua PKH Kecamatan Sukawangi Sdr. Damiri; konsistensi tim pelaksanaan program PKH adalah memastikan proses berjalan dengan rapih misalnya pendataan verifikasi, pencairan dan pendampingan terhadap penerima bantuan. Secara khusus kami dari pendamping, memastikan warga penerima bantuan kesehatan menggunakan haknya dalam berobat misalnya.

C. Kelompok Sasaran :

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada dukungan dari masyarakat terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan ?

Jawaban :

1. Bapak Hasbullah Warga Penerima Bantuan, : kalo saya memang butuh bantuan. Makanya saya sengaja hadir pertemuan. Tetapi ada juga tetang kampung yang namanya tidak masuk data, padahal keluarganya dari kalangan tidak mampu.
2. Bapak Irwan Hakim Warga Penerima Bantuan; bagus program bantuan kaya begini. Lumayan kami warga kurang mampu dibantu untuk berobat dan sekolah anak-anak. Kalo jumlahnya memang gak besar, tapi sangat membantu buat orang seperti kami.

Pertanyaan : Seperti apa bentuk dukungan masyarakat ?.

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar; bentuk dukungan masyarakat secara konkrit adalah mendata dirinya apabila tidak terdata dalam program. memang untuk target bantuan pada tahun ini masih jauh dari harapan, akan tetapi saya melihat

masih ada warga yang terlambat menginformasikan kalo dirinya tidak terdata. Ini tentu saja menjadi evaluasi bagi pemerintah, namun juga masyarakat dihimbau untuk aktif mengambil peran untuk kepentingan dirinya juga.

2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar ; dukungan masyarakat ya sederhana saja misalnya menghadiri kegiatan sosialisasi, memberikan data diri secara benar, melengkapi persyaratan yang diminta, dan datang pada saat pencairan. Memang saya dengar masih ada di desa lain yang warganya tidak terdata padahal masuk kategori miskin, sebagai catatan bahwa masyarakat memang masih butuh pendampingan maksimal dari aparat.

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada pemahaman dari masyarakat mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan ?

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar; saya melihatnya berimbang. Masih banyak masyarakat tidak mengetahui program ini, tetapi banyak juga masyarakat yang tau bahwa untuk dirinya yang miskin ada bantuan untuk kesehatan dan pendidikan.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar ; kalo mau jujur, banyak juga warga yang belum tau secara mendalam apa itu PKH. Apakah keluarganya masuk kategori atau tidak. Rata-rata masyarakat hanya tau ada bantuan untuk anak sekolah. Memang butuh sosialisasi lebih lanjut kedepannya.
3. Bapak Hasbullah warga Penerima Bantuan, : PKH adalah program untuk membantu masyarakat miskin yang punya anak sekolah. Saya kebetulan mengikuti pertemuan sampai selesai waktu pertama kali jadi lumayan inget apa itu PKH.
4. Bapak Irwan Hakim Warga Penerima Bantuan, : PKH adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan untuk masyarakat miskin yang punya anak balita dan anak sekolah. Biaya kesehatan untuk warga miskin. Diberikan dalam bentuk uang empat kali dalam setahun.

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada kesesuaian antara masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dengan kondisi perekonomiannya ?

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar,: untuk pendataan sudah dilakukan oleh BPS dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar , : pendataan calon peserta program keluarga harapan dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan kepala desa. Setelah data keluarga miskin diperoleh, kami perangkat kemudian mendapat instruksi memberikan undangan pertemuan awal dalam rangka sosialisasi program keluarga harapan oleh Dinas sosial dan unit pengelola program keluarga harapan Kabupaten.
3. Bapak Hasbullah Warga Penerima Bantuan, mengatakan : untuk pendataan kami didatangi oleh pegawai kecamatan dan desa, ditanyakan data kesejahteraan. Kemudian kami menerima undangan untuk ikut sosialisasi PKH di desa.
4. Bapak Irwan Hakim Warga Penerima Bantuan; untuk pendataan kami hanya menjawab pertanyaan yang diajukan, kemudian menunjukan ktp dan kartu keluarga untuk dicek anggota keluarga yang balita, dan yang sekolah.

D. Faktor Lingkungan :

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada factor ekonomi yang mendukung keberhasilan kebijakan implementasi PKH pada rumah tangga sangat miskin ?

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar, : untuk anggaran dana, pemerintah kecamatan tidak mengeluarkan karena itu berasal dari pusat (APBN). Sementara untuk biaya operasional rapat dan proses pendataan bersumber dari APBD, tetapi besarannya kami tidak mengetahui. Tetapi jumlah itu (total anggaran untuk penerima) saya kira masih sangat kurang karena masih banyak masyarakat yang berpotensi menjadi peserta.

2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar , : untuk dukungan ekonomi dari daerah sepengetahuan saya berasal dari pusat, daerah hanya dibebankan untuk operasional petugas pendamping saja. Untuk kesesuaian anggaran dengan peserta yang ada, saya kira masih harus ditambahkan karena banyak warga miskin yang belum dijadikan saarapeserta karena masih terbatasnya anggaran dari pusat.
3. Ketua PKH Desa Sukamekar, : untuk masalah ekonomi anggaran, kami tim teknis lapangan tidak sepenuhnya memahami. Hanya memang setau kami itu berasal dari APBN anggarannya. Untuk bantuan tunai pada masyarakat maupun kebutuhan operasional selama kebijakan dijalankan.

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I, Apakah ada mobilisasi kelompok yang menolak dan mendukung implementasikebijakan PKH pada rumah tangga sangat miskin ?

Jawaban :

1. Kepala Desa Sukamekar, : Perubahan yang saya lihat setelah RTSM mendapatkan PKH yaitu mereka ketika hamil atau belitanya sakit mau ke Puskesmas.
2. Bapak Pendamping PKH Desa Sukamekar : Perubahan yang saya lihat dan menurut pengakuan mereka, mereka bisa meng-cover seluruh kebutuhan anak-anak mereka. Baik itu yang sekolah, maupun yang masih balita.
3. Bapak Hasbullah Warga Penerima Bantuan,: Sebelum ada PKH Ibu tidak bisa menyekolahkan anak pertama, tapi setelah ada PKH alhamdulillah anak-anak Ibu bisa bersekolah.
4. Bapak Irwan Hakim Warga Penerima Bantuan: Perubahannya sebelumnya saya kayaknya tidak bisa menyekolahkan anak. Tapi alhamdulillah anak saya pada sekolah semua.

Hardcover FIKI. FIX.pdf

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
5	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1%
8	repository.unigal.ac.id:8080 Internet Source	<1%
9	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
10	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
11	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
12	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%



UNIVERSITAS ISLAM 45
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

Nomor : H.0718/UNISMA.FISIP/E/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara
dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Sukamekar Kec. Sukawangi Kab. Bekasi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, maka mahasiswa kami di bawah ini:

Nama : Fiki Paradise Albina
NPM : 41183506190025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
No. Telepon : 089646671295
Dosen Pembimbing : Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.

Mohon diizinkan untuk dapat melakukan observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan. Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul:

**Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program
Keluarga Harapan di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bekasi, 10 Desember 2025



Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.
NRP : 45101071989005



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN SUKAWANGI
DESA SUKAMEKAR

Alamat : Jl. Raya Sukamekar No. 01 Kode Pos : 17655, Email : sukamekarmantap1@gmail.com

Sukamekar, 12 Februari 2026

No. : 142.48/041/Pem-SKM/II/2026
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara
Pencarian data untuk keperluan Skripsi.

Yth. Kepala Desa Sukamekar

Di –

Tempat

Menjawab Surat Dekan Universitas Islam 45 Bekasi, Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara & Pencarian data untuk keperluan Skripsi Atas Nama Mahasiswa :

Nama : **FIKI PARADISE ALBINA**
NPM : **411 83506190025**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
No. HP : **089646671295**

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian, Observasi, Wawancara & Pencarian data untuk keperluan Skripsi.

Bertempat di Kantor Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sukamekar


H. JAAIDIN



UNIVERSITAS ISLAM 45 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI NOMOR SK : H.0204/UNISMA.FISIP/KD/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

- Menimbang :**
1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat Skripsi/Tugas Akhir
 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan Skripsi, maka diperlukan pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
 3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan
 3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang Pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Februari 2006
 4. SK Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang Kurikulum
- Memperhatikan :**
1. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi
 2. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Maret 2013

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Mengangkat saudara **Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.** sebagai Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa
- N a m a :** Fiki Paradise Albina
N P M : 41183506190025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
- Kedua :** Penulisan Skripsi/Tugas Akhir berlaku sampai dengan **31 Agustus 2026**. Bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul Skripsi/Tugas Akhir.
- Ketiga :** Pembayaran bimbingan Skripsi/Tugas Akhir berlaku sampai dengan **31 Agustus 2026**. Bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan Skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 11 Februari 2026
Dekan,

Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. DAPA Loket 2 UNISMA Bekasi
2. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan S1
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang Bersangkutan.
5. Arsip

1. SK Skripsi ke 0: Ganjil 2025/2026 – Genap 2025/2026 (revisi judul ke 2)



UNIVERSITAS ISLAM 45
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER..... TAHUN AKADEMIK/.....

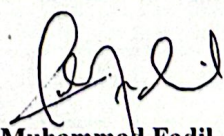
NAMA : Fumi Paradise Albina
NPM : 41183506190025
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Bekasi, 21 April 1998
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN (SI)
NO. TELEPON/HP : 0896 4667 1295
PEMBIMBING : Yanto Supriyadno
ALAMAT : Kp. Pekopen barak rt. 03/04. Ds. Lambang Jaya
JUDUL SKRIPSI : KEC. Tambora Selatan
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.1
TH. 2018 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI DESA SUKAMEKAR KEC. SUKAWANGI, KAB. BEKASI

No	Tanggal Bimbingan	Kegiatan	Paraf
1.	19-Sept-2025	Pengajuan judul	Y
2	29-Sept-2025	Bimbingan Bab 1-3	Y
3	04-Des-2025	Revisi Bab 1-3	Y
4	09-Des-2025	Pelaksanaan sidang proposal	Y
5	15-Des-2025	Menyerahkan revisi Bab 1-3	Y
6.	18-Des-2025	Bimbingan Bab 4-5 terkait data	Y
7	29-Des-2025	revisi Bab 4-5	Y
8	13-Jan-2025	Bimbingan evaluasi Bab 1-5	Y
9	22-Jan-2025	Revisi Bab 1-5	Y
10	03-Feb-2026	Bimbingan pengajuan sidang	Y
11	12-Feb-2026	Pelaksanaan sidang Akhir	Y

Catatan :

1. Berlaku untuk 2 semester masa bimbingan (bulan awal semester sampai akhir semester ke 2)
2. Masa bimbingan minimal 4 bulan dengan jumlah pertemuan minimal 10 kali

Bekasi, 12 Feb 2026
Kaprodi Ilmu Pemerintahan SI


Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.

DOKUMENTASI

